



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Home > advertorial

Agar Tak Terulang Tahun 2024, Komisi C DPRD Sidoarjo Minta Sanksi Proyek Molor Dipertegas



by **ZonaJatim00** — 30 Januari 2024



0

SHARES



Zonajatim.com, Sidoarjo – Molornya beberapa proyek pembangunan infrastruktur di

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo hingga akhir tahun 2023 dari waktu yang telah disepakati oleh dinas terkait dengan pihak ketiga, mendapat perhatian Komisi C DPRD Sidoarjo.

Misalnya pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri ((SMPN) 2 Tulangan, SMPN 2 Jabon, Alun-alun Sidoarjo serta revitalisasi kawasan trotoar atau pedestrian di Stadion Gelora Delta (GOR) Sidoarjo.

HM. Nizar, anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa keterlambatan proyek pembangunan ini disebabkan oleh pihak ketiga yang menang tender kurang profesional. Sehingga tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. "Mestinya pada saat menerima pekerjaan itu sudah dapat menghitung lama pekerjaannya. Kalau dirasa waktunya terlalu mepet harusnya menambah tenaga pekerja," kata M Nizar, kemarin.

Melihat progres proyek yang dipantau pada akhir 2023, pihaknya pesimistis sejumlah proyek bisa tuntas sesuai target. Yaitu, maksimal 31 Desember. "Buktinya, masih ada pekerjaan dengan progres minim. Dinas sumber daya air dan bina marga, Disdik dan DLHK harus mengevaluasi," papar politikus Golkar itu.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Oleh karena itu, Nizar meminta adanya tindakan tegas kepada kontraktor yang molor. Misalnya, diberikan sanksi denda dan dipertegas seperti perlu dimasukkan ke daftar hitam. Tujuannya, perusahaan yang bersangkutan tidak diperkenankan mengerjakan proyek pemerintah dalam kurun waktu tertentu. "Ini sebagai efek jera ke kontraktor untuk memperbaiki kinerjanya, agar tahun 2024 ini tidak terulang ada proyek molor lagi," tegas politikus asal Krian ini.



Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo M Nizar dari Partai Golkar

Disamping itu, kurangnya peran konsultan pengawas dalam melakukan pengawasan setiap paket pekerjaan yang diterima oleh kontraktor dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Sehingga berdampak pada kualitas bangunan dan molornya pekerjaan. "Konsultan pengawas ini harus benar-benar mengawasi pelaksanaan proyek, mulai dari spesifikasi hingga masa pekerjaan. Bukan hanya sebagai pantes-pantesan saja yang seolah-olah tidak memiliki fungsi apapun," katanya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Lebih lanjut Nizar menilai bahwa banyaknya proyek pembangunan yang mengalami keterlambatan akan mencederai citra Bupati Sidoarjo, H. Ahmad Muhdlor yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda yang gesit dan serba cepat.

Apalagi ada beberapa proyek pembangunan yang belum selesai atau molor itu berada di tengah-tengah kota, seperti revitalisasi trotoar Stadion Gelora Delta Sidoarjo dan Alun-alun yang sangat mengganggu estetika kota. "Dibawah kepemimpinan bupati yang dikenal kerja serba sat-set ini, harusnya mereka juga mengimbangi. Bukan malah merusak citra itu," ucapnya.

Pria yang maju lagi sebagai calon anggota legislatif (caleg) melalui Daerah Pemilihan (Dapil) Sidoarjo 4 (Tarik, Balongbendo dan Krian) itu menyarankan agar proyek-proyek strategis Pemkab Sidoarjo dapat dilelang atau tender di triwulan pertama. Tidak seperti di tahun kemarin yang banyak dilakukan di triwulan ketiga. "Kalau triwulan pertama sudah tender selesai maka keterlambatan pekerjaan

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

tidak akan sampai lewat tahun anggaran," jelasnya.

Perlu diketahui pembangunan gedung SMPN 2 Tulangan tahap pertama pada tahun 2022 bermasalah, gedung yang dibangun kekurangan volume dan jadi temuan BPK sehingga pelaksana proyek CV Jaya Mulia diwajibkan mengembalikan uang ke kas daerah.

Kemudian pada tahun 2023 perusahaan yang sama, CV Jaya Mulia menang tender pelaksana pembangunan lanjutan gedung SMPN 2 Tulangan. Namun masalah kembali terjadi, proyek tersebut tidak selesai tepat waktu atau lebih dari 31 Desember 2023.

Hingga pada 8 Januari lalu, proyek yang menelan anggaran Rp 5 miliar itu tak kunjung selesai. Sejumlah pekerja masih melanjutkan pekerjaan, seperti pemasangan daun pintu dan pekerjaan finishing lainnya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Molornya penggarapan proyek-proyek pembangunan infrastruktur di kota delta terjadi akibat lemahnya Pemkab Sidoarjo dalam menata pola mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan. “Intinya begini, kelemahan ini menyeluruh dari hulu sampai hilirnya,” tandas Anang Siswandoko Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo. Mulai dari tata kelola waktu, penentuan pemenang tender hingga pengawasan yang dilakukan.



Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Proyek-proyek molor yang disorotnya itu diantaranya lanjutan pembangunan Gedung SMP Negeri 2 Tulangan senilai Rp 5,4 Miliar. Lalu pembangunan gedung SMP Negeri 2 Prambon yang berbandrol Rp 6,6 Miliar.

Yang paling kentara adalah proyek Revitalisasi Taman Alun-Alun Kabupaten dan Median Jalan Sekitarnya yang menelan dana lebih dari 6 Miliar. Juga proyek pembangunan Trotoar Jalan Perkotaan di kawasan GOR Gelora Delta hingga sepanjang Jalan Lingkar Barat Sidoarjo yang dibiayai APBD 2023 sebesar Rp 9,1 Miliar.

Diatas pedestrian sepanjang 1.210 meter tersebut selanjutnya dibangun taman yang dilengkapi dengan lampu-lampu jalan dan pernak-pernik lainnya yang didanai uang rakyat sebanyak Rp 6,2 Miliar. "Itu belum termasuk anggaran untuk membayar konsultan perencanaan. Tapi semua itu gagal diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu ditentukan sebelumnya," tambah Anang.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Legislator DPRD Sidoarjo yang menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan manajemen tata kelola proyek infrastruktur itu harus dimulai dari perhitungan waktu yang cermat pada saat perencanaan. "Prosesnya harus dimulai dari lelang konsultan perencanaan, konsultan pengawas dan kemudian baru kontraktor pelaksana. Timeline nya harus diatur. Butuh berapa lama di tahapan ini. Seharusnya yang begini-begini ini sudah bisa dimulai sejak awal tahun seperti saat ini, khususnya untuk proyek penataan kota," ujar politisi senior itu.

Dengan begitu kontraktor pelaksana punya rentang waktu yang cukup untuk menuntaskan garapannya. Termasuk mempertimbangkan segala kemungkinan yang bisa menimbulkan kendala-kendala teknis dalam proses pengerjaan.

Kalau tahapan ini baru dimulai di triwulan kedua sehingga penggarapannya baru bisa dilakukan di akhir triwulan ketiga, ya pasti sulit menyelesaikan proyeknya di akhir tahun. Perlu kerja yang sangat keras, imbuh Anang.

Jika ada paket pekerjaan dari Pemkab Sidoarjo yang tidak selesai tepat waktu, maka kontraktor pelaksana akan dikenakan denda keterlambatan. "Denda keterlambatan, nilainya 1/1.000 (satu per mil) dikali nilai kontrak. Ini berlaku per-hari," imbuhnya.

Anang menambahkan bahwa dirinya sejak awal sudah memprediksi bahwa proyek revitalisasi Alun-alun Sidoarjo bakal molor karena waktunya mepet. "Kami berharap terhadap kontraktor yang proyeknya molor harus lebih dipertegas sanksinya, jadi tidak cuma denda keterlambatan namun juga sanksi lainnya, sehingga di tahun 2024 ini tidak ada lagi proyek molor," tegasnya.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Wakil ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Anang Siswandoko dari Partai Gerindra

Faktor kedua adalah kecermatan Pemkab Sidoarjo dalam menentukan mitra kerjanya. Mulai dari konsultan perencana, pengawas maupun penggarap. "Pilih yang profesional. Kalau punya rekam jejak yang kerjanya lelet, ya jangan diambil. Jangan hanya melihat nama perusahaannya, tapi siapa pengendalinya. Karena satu kontraktor bisa punya banyak PT dan CV," tukasnya.

Dan jika ternyata sang kontraktor berani mengambil proyek tertentu dengan tenggat waktu yang mepet, harusnya bisa diperhitungkan berapa banyak tenaga yang harus dikerahkan. "Kalau kemudian berdalih keterlambatan itu karena masih harus nunggu teknis kelistrikan dan sebagainya, khan konyol," katanya.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Dan ujung dari semua itu adalah kualitas kinerja dari sang kontraktor pengawas yang harus bekerja sesuai tugas dan fungsinya. “Mereka itu kita bayar mahal lho. Masa uang sebesar ratusan juta rupiah kita buang-buang untuk membayar pengawas yang hanya buat pantes-pantesan saja,” tegasnya.

Memang, keterlambatan itu membuat kontraktor pelaksana harus membayar denda yang besarnya sudah tertera di aturan yang berlaku. “Ini bukan soal berapa nilai rupiah yang kembali ke kas daerah, tapi soal wajah kota yang jadi amburadul. Apalagi kawasan GOR itu ibarat etalasenya Sidoarjo,” pungkas Anang.

Untuk memaksimalkan pembangunan infrastruktur di tahun 2024 ini, pihaknya menekankan percepatan proses lelang atau tender di awal perencanaan anggaran 2024.

Pernyataan tersebut, sesuai dengan yang disampaikan langsung oleh anggota Komisi C Hamzah Purwandoyo.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Hamzah mengatakan bahwa, proses lelang di akhir tahun harus mulai dihindari. Tujuannya agar nilai Silpa juga bisa ditekan. Sehingga, dia pun memperingatkan agar seluruh Organisasi Perangkat Desa (OPD) dapat segera melakukan lelang terhadap seluruh proyek tender terutama yang terkait langsung dengan masyarakat.

Menurut politikus PKB itu, percepatan lelang harus dilakukan juga untuk menghadapi masa transisi. Terutama, saat ini Pemilihan Presiden (Pilres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) sedang berlangsung. "Semua harus cepat dimulai dari sekarang agar tidak berdampak buruk pada masyarakat," ujarnya.

Hamzah berharap pelaksanaan lelang pekerjaan fisik di awal tahun bisa membuat pekerjaan lebih maksimal dan dapat dinikmati masyarakat dengan segera. "Lelang-lelang harus dimulai di awal tahun agar pekerjaan berjalan dengan baik dan maksimal," paparnya.



Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo Hamzah Purwandoyo dari PKB

Lebih jauh, Hamzah mengatakan molornya sejumlah proyek pekerjaan yang belum selesai tahun 2023, jangan sampai terulang tahun 2024. "Harusnya pekerjaan dijadwalkan tidak mepet agar pekerjaan itu bisa selesai tepat waktu sesuai jadwal dan kontrak pekerjaan," imbuhnya.

Menurut Hamzah, berdasar pantauan Komisi C memang proyek yang digarap rata-rata jelang akhir tahun 2023 tidak selesai sesuai skedul hingga 100 persen seperti revitalisasi Alun-alun Sidoarjo dan GOR Delta. "Kalau tidak selesai dan diperpanjang waktu pekerjaan maka wajib dikenai sanksi rekanan pelaksana proyek," tegasnya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

“Kami memastikan proyek Alun-alun dan GOR ini tidak bisa selesainya tepat waktu. Maka rekanaan pelaksanaan harus dikenai denda dan harus dibayar kontraktor. Karena kontraknya berakhir sampai pukul 24.00 WIB 31 Desember 2023 tapi belum selesai 100 persen, kami berharap denda harus dipertegas lagi sehingga kontraktor tidak mengulangi lagi, dan tahun 2024 tidak ada proyek molor lagi,” ungkapnya.

Selain itu, Hamzah mengingatkan Pemkab Sidoarjo agar semua proyek pekerjaan fisik lelang dipercepat. Tujuannya agar tidak terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan fisik seperti revitalisasi Alun-alun dan trotoar GOR Delta.”Kami sudah sering mengingatkan Pemkab Sidoarjo dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lelang dikerjakan pada awal tahun. Karena ini berkaitan dengan kualitas pengerjaan proyek agar tidak dikerjakan secara tergesa-gesa dan mengutamakan kualitas pekerjaan,” pintanya.

Zonajatim.com

Terkait proyek fisik yang molor tahun 2023, anggota Komisi C DPRD Sidoarjo M Sohib menyatakan, kontraktor yang proyeknya molor harus diberi sanksi. Bukan malah mendapatkan tambahan waktu. Itu menjadi bentuk ketegasan agar kontraktor tidak main-main dengan proyek pemkot. "Sisa pekerjaan bisa dikerjakan satgas dinas terkait seperti Bina Marga, DLHK," kata politisi Partai Nasdem ini.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo M Sochib dari Partai Nasdem

Menurut dia, jika rekanan diberi tambahan waktu, mereka akan terkesan meremehkan. Itu akan menjadi pengalaman buruk ke depan. "Kalau terus-terusan diberi adendum, nanti kami diremehkan kontraktor," ujarnya.

Jika pekerjaan belum rampung dalam situasi normal, sebaiknya pekerjaan distop. Sisanya bisa dituntaskan satgas OPD. "Langsung diputus saja," tegasnya.

Adendum hanya diberikan dalam kondisi darurat atau force majeure. Namun, jika dalam kondisi normal, sebaiknya dihentikan. Itu juga bertujuan menghilangkan kecurigaan. Jika dilanjutkan pun tidak akan positif. Sebab, pasti ada pertanggungjawaban soal keuangan.

"Apalagi, nanti ada jajaran samping dari kejaksaan yang ikut mengawasi. Bisa bahaya," paparnya.

Selain itu, M Sochib setuju bila OPD terkait memberikan tindakan tegas kepada kontraktor yang pekerjaannya tak tuntas. Yakni, dengan mem-blacklist kontraktor. Mereka yang bekerja asal-asalan dan tidak sesuai target tidak boleh lagi mengerjakan proyek-proyek pemerintah. "Ini era keterbukaan. Nggak apa-apa blacklist saja sebagai efek jera,' sehingga tahun 2024 tidak ada proyek molor lagi," tegas politikus Nasdem itu. Sp/adv



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



JawaPos.com



Nasional

Surabaya Raya

Sepak Bola Indonesia

Peran Strategis DPRD Sidoarjo Kawal Pembangunan Daerah

ARM Selasa, 30 Januari 2024 | 19:18 WIB



DPRD Kabupaten Sidoarjo mengesahkan Raperda Sidoarjo tentang P-APBD 2023 yang ditandai dengan penandatanganan bersama antara Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dan pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo. (DPRD Sidoarjo untuk Jawa Pos)

Jawa Pos

Realisasi **Anggaran** 99 Persen, Jaga Sinergi Legislatif-Eksekutif

JawaPos.com–**DPRD** punya peran strategis dalam mengawal pembangunan di daerah. Baik melalui **fungsi legislasi**, anggaran, maupun **pengawasan**.

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Untuk fungsi legislasi, pada 2023 DPRD **Sidoarjo** mengusulkan 23 rancangan peraturan daerah (raperda) dan 7 di antaranya merupakan raperda inisiatif. Pada fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Sidoarjo konsisten melakukan monitoring dan evaluasi (monev) triwulan terhadap dinas terkait. Langkah itu bertujuan agar program pemda bisa berjalan *on the track*.

"Dalam triwulan pertama setidaknya capaian program kerja pemda harus 25 persen. Alhamdulillah (pada 2023) capaian program Pemkab Sidoarjo sudah 99 persen," terang Ketua DPRD Sidoarjo H Usman.

Jawa Pos

DPRD Sidoarjo juga telah mengesahkan besaran APBD tahun anggaran 2024 senilai Rp 5,25 triliun. Untuk pendapatan daerah disepakati Rp 4,98 triliun; belanja daerah Rp 5,25 triliun; sedangkan pembiayaan daerah sebesar Rp 350 miliar. Dari perincian itu, terdapat kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp 846 miliar dari tahun sebelumnya.

Jawa Pos

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

"Anggaran itu akan dimanfaatkan untuk mendukung 17 program prioritas bupati yang sudah tercantum dalam RPJMD 2021–2026. Karena ini adalah tahun terakhir bupati (Ahmad Muhdlor) menjabat, jadi harapannya bisa terealisasi semua karena anggaran sudah disiapkan," ucap Usman.

Kendati demikian, Usman percaya laju pembangunan di Sidoarjo tak melulu soal anggaran, melainkan juga kolaborasi dan sinergi legislatif eksekutif. Hal itu diapresiasi pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dengan memberikan amanah pembangunan tiga *flyover* sekaligus. Yakni, *flyover* di wilayah Aloha, Krian, dan Tarik, untuk menyelesaikan persoalan lalu lintas di Sidoarjo.

Jawa Pos

Hasil kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo sepanjang 2023 sudah tampak. Berbagai kebijakan terus dikawal sampai bisa dinikmati masyarakat. Kebutuhan dan kepentingan warga menjadi prioritas. Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif terbukti melalui kebijakan dan aktivitas pembangunan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, maupun politik di Kabupaten Sidoarjo.

Ketua Komisi A Dhamroni Chudlori memaparkan, 100 persen aduan masyarakat terkait hukum dan pemerintahan sudah ditindaklanjuti.

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

"Rata-rata terkait sengketa lahan. Ada yang antara warga dengan perusahaan atau warga dengan pemda. Maka kami fasilitasi melalui *hearing* dan tinjauan lapangan. Seluruh rekomendasi terkait aduan masyarakat sudah kami sampaikan ke OPD," ungkap Dhamroni.

Baca Juga: Bupati Sidoarjo Naikkan Honor Ribuan Kader Kesehatan dan Beri Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan

Ketua Komisi B Bambang Pujiyanto mengatakan, pendapatan daerah pada 2023 berhasil melampaui target.

Jawa Pos

"Dari target Rp 4,874 triliun, realisasinya sampai Desember akhir bisa naik dan terlampaui hingga Rp 5,20 triliun," papar Bambang.

Sementara itu, pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak, retribusi, dan lainnya ditargetkan Rp 1,9 triliun. Namun, realisasinya berhasil mencapai angka Rp 2 triliun.

"Pendapatan dari pajak daerah adalah yang paling besar. Dari target Rp 1,2 triliun menjadi lebih dari Rp 1,3 triliun," tutur Bambang.

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo juga berlangsung baik. Terbukti dari lampauan target nilai investasi dari Rp 7 triliun menjadi Rp 14 triliun. Pada 2024, sebagian anggaran harus dialokasikan untuk pesta politik pemilihan umum.

Belakangan, Pemkab Sidoarjo mulai gencar membenahi taman. Terlihat beberapa taman sudah direvitalisasi.

Jawa Pos

Seperti kawasan Monumen Jayandaru. Di area monumen itu akan dibangun air mancur dan taman bermain anak.

Baca Juga: Capai Rp 1,3 Triliun, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Tegaskan Pajak untuk Peningkatan Pembangunan Infrastruktur

Kemudian, trotoar area GOR Sidoarjo juga diperbaiki. Saat ini sedang pengerjaan pembuatan drainase dan gorong-gorong. Nantinya, lantai trotoar akan dipasang granit.

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Anang Siswandoko mendukung pembenahan atau pembuatan taman di Kota Delta. "Yang terpenting setelah dibangun, harus dirawat dengan baik, supaya benar-benar bermanfaat untuk warga Sidoarjo," ucap Anang Siswandoko.

Beberapa waktu lalu, komisi C juga menggelar *hearing* terkait rencana revitalisasi Depo Pasar Ikan di daerah Lingkar Timur. Rapat yang dipimpin Anang Siswandoko itu membahas permasalahan drainase, penimbangan ilegal, penataan parkir, pembangunan gedung baru, hingga pengalihan fungsi lahan.

Jawa Pos

Sekretaris Komisi D yang juga mewakili Badan Anggaran DPRD Sidoarjo Bangun Winarso menyebut, pihaknya terus berkomitmen melakukan pengawasan terhadap 16 mitra kerja. "Alhamdulillah indikator literasi numerasi di Sidoarjo baik. Di samping itu, IPM kita 81,5 terbilang tinggi," ujar Bangun.

Dari sisi kesehatan, pelayanan kesehatan di Sidoarjo cukup terkendali, baik saat pandemi maupun setelahnya. Pemda Sidoarjo juga membangun RSUD Sidoarjo Barat (Sibar) serta empat puskesmas baru sebagai upaya promotif preventif. Gencarnya pembangunan fasilitas kesehatan itu ditujukan sebagai bentuk pemerataan kesehatan. (nad/c17/xav)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Gaji ASN Naik, Cair 1-2 Hari Lagi

IKN Butuh 250 Ribu PNS Fresh Graduate

JAKARTA – Kenaikan gaji sebesar 8 persen yang dijanjikan pemerintah untuk aparatur sipil negara (ASN) bakal cair dalam beberapa hari ke depan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas sudah mengirim surat dan harmonisasi dengan Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara.

"Saya belum dapat info dari Kementerian Keuangan, mestinya sudah bisa cair 1-2 hari ini," ujarnya ditemui se usai rapat komite manajemen risiko pembangunan nasional (MRPN) di kantor Bappenas kemarin (30/1).

Kepastian itu diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10/2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil dan Perpres Nomor 11/2024 tentang Daftar Gaji

Pokok dan Tunjangan PPPK Tahun 2024. Dalam beleid itu, disebutkan pula besaran kenaikan dari PNS dan PPPK secara terperinci untuk masing-masing golongan.

Dalam kesempatan tersebut, Anas turut membahas perpindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara. Menurut dia, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar dirinya membuat skenario komprehensif terkait rencana pemindahan ASN.

"Termasuk formasi pemerintah pusat sebanyak 250 ribu *fresh graduate* buat IKN, termasuk dipilih talenta digital yang rencananya Maret akan mulai tes untuk mereka," ujarnya.

Rencana itu linier dengan proses pematangan sistem *smart* ASN yang akan mengintegrasikan seluruh layanan ASN ke dalam satu aplikasi. Talenta digital kembali ditekankan mengingat nanti sistem digital diterapkan sepenuhnya di IKN. "Layanannya juga digital dan kita sedang mempertim-

bangkan untuk persentase masyarakat lokal diberi ruang khusus di ASN IKN," sambungnya. Besaran persentasenya masih didiskusikan bersama presiden.

Apakah seleksi CASN untuk penempatan IKN bakal lebih ketat? Anas mengamini. CASN diminta agar kualifikasinya lebih berkualitas. Sehingga nanti tidak ada lagi drama tidak tersedianya SDM untuk kompetensi yang diperlukan di sana. Anas juga menyampaikan kesiapan fasilitas untuk proses pemindahan ASN. Menurut dia, sudah ada beberapa tower yang siap. Sehingga sampai Juli 2024, ada 7.500 ASN yang akan dipindahkan.

Mengenai tunjangan khusus bagi ASN yang pindah di awal, Anas mengaku masih dalam proses pembahasan dengan Kementerian Keuangan. Perumusan terus digodok karena berkaitan dengan hunian yang akan ditempati di sana bagi mereka yang *single* atau membawa keluarga. (mia/c6/fal)

Jawa Pos

Peran Strategis DPRD Sidoarjo Kawal Pembangunan Daerah

Realisasi Anggaran 99 Persen, Jaga Sinergi Legislatif-Eksekutif

DPRD punya peran strategis dalam mengawal pembangunan di daerah. Baik melalui fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan.



7 PERDA INISIATIF DPRD SIDOARJO

- Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan, Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kawasan Industri dan Kawasan Perdagangan/Jasa
- Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kemukiman
- Perlindungan dan Pemenuhan Hak Pengendali Disabilitas
- Fasilitas Penyelenggaraan Perawatan
- Pengembangan Konektivitas Sosial
- Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Perumahan dan Anggla Dawaan Perumahan Rakyat Daerah
- Pengembangan Kawasan Kawasan

Dari sisi kesehatan, pelayanan kesehatan di Sidoarjo cukup terkendali, baik saat pandemi maupun setelahnya. Penda Sidoarjo juga membangun RSUD Sidoarjo Barai (Sibar) serta pusat kesehatan baru sebagai upaya promotif-preventif. Gencarnya pembangunan fasilitas kesehatan itu diujikan sebagai bentuk pemerataan kesehatan. (nrd/c7/taw)

UNTUK fungsi legislasi, pada 2023 DPRD Sidoarjo mengesahkan 23 rancangan peraturan daerah (rapda) dan 7 di antaranya merupakan rapda inisiatif. Pada fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Sidoarjo konsisten melakukan monitoring dan evaluasi (monv) terhadap dinas terkait. Langkah itu bertujuan agar program penda bisa berjalan on the track. "Dalam iritulan pertama selidiknya capaian program kerja penda harus 25 persen. Alhamdulillah (pada 2023) capaian program Pemkab Sidoarjo sudah 99 persen," terang Ketua DPRD

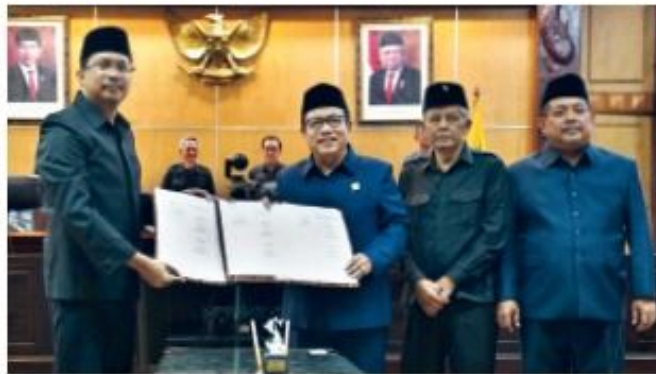
Sidoarjo H Usman. DPRD Sidoarjo juga telah mengesahkan besaran APBD tahun anggaran 2024 senilai Rp 5,25 triliun. Untuk pendapatan daerah disepakati Rp 4,98 triliun; belanja daerah Rp 5,25 triliun; sedangkan pembiayaan daerah sebesar Rp 350 miliar. Dari perincian itu, terdapat kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp 846 miliar dari tahun sebelumnya.

"Anggaran itu akan dimanfaatkan untuk mendukung 17 program prioritas bupati yang sudah tercantum dalam RPMD 2021-2026. Karena ini adalah tahun terakhir bupati (Ahmad Muhdlor) menjabat, jadi harapannya bisa terrealisasi semua karena anggaran sudah dilakikan," ucap Usman.

Kendati demikian, Usman percaya laju pembangunan di Sidoarjo tak melulu soal anggaran, melainkan juga kolaborasi dan sinergi legislatif-eksekutif. Hal itu diupayakan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dengan memberikan amanah pembangunan tiga flyover sekaligus, Yaker, flyover di wilayah Aloha, Krian, dan Yaker untuk menyelesaikan persoalan lalu lintas di Sidoarjo.

Kebutuhan dan Kepentingan Warga Jadi Prioritas

Hasil kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo sepanjang 2023 sudah tampak. Berbagai kebijakan terus diawal sampai bisa dinikmati oleh masyarakat. Kebutuhan dan kepentingan warga menjadi prioritas. Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif terbukti melalui kebijakan dan aktivitas pembangunan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, maupun politik di Kabupaten Sidoarjo.



CARA TARGET: DPRD Kabupaten Sidoarjo mengesahkan Rapda Sidoarjo tentang P-APBD 2023 yang ditandatangani bersama antara Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dan pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Ketua Komisi A Dhamroni Chudori memaparkan, 100 persen audan masyarakat terkait besok dan pemerintahan sudah ditindaklanjuti. "Ita-ra terkait sengketa lahan. Ada yang antara warga dengan perusahaan atau warga dengan penda. Maka kami fasilitasi melalui hearing dan litigasi lapangan. Seluruh rekomendasi terkait audan masyarakat sudah kami sampaikan ke DPRD," ungkap Dhamroni.

Ketua Komisi B Bambang Pujiyanto mengatakan, pendapatan daerah pada 2023 berhasil mencapai target. Dari target Rp 4,974 triliun, realisasinya sampai Desember akhir bisa naik dan terlampaui hingga Rp 5,20 triliun," paper Bambang. Sementara itu, pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak, retribusi, dan lainya ditargetkan Rp 1,9 triliun. Namun, realisasinya berhasil mencapai angka Rp 2 triliun. "Pendapatan dari pajak

daerah adalah yang paling besar. Dari target Rp 1,2 triliun menjadi lebih dari Rp 1,3 triliun," tutur Bambang. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo juga berlangsung baik. Terbukti dari lapangan target nilai investasi dari Rp 7 triliun menjadi Rp 14 triliun. Pada 2024, sebagian anggaran harus dialokasikan untuk perlu politik pemilihan umum.

Selakangan, Pemkab Sidoarjo mulai gencar membenahi lahan. Terlihat beberapa lahan sudah direvitalisasi. Seperti kawasan Mororan Jayaduri. Di area monumen itu akan dibangun air mancur dan lahan bermain anak. Komoditas, trokor area GOR Sidoarjo juga diperbaiki. Saat ini sedang pengerjaan pembuatan drainase dan gonggong. Nantinya, lantai trokor akan dipasang granit.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Anang Siswandoko mendukung

pembenahan atau pembenahan lahan di Kota Delta. "Yang terpenting setelah dibangun, harus dirawat dengan baik, supaya benar-benar bermanfaat untuk warga Sidoarjo," ucapnya.

Beberapa waktu lalu, Komisi C juga menggelar hearing terkait rencana revitalisasi Depo Pasar Ikan yang berlokasi di daerah Lingkar Timur. Rapat yang dipimpin Anang Siswandoko itu membahas permasalahan drainase, penimbunan ilegal, penataan parkir, pembangunan gedung baru, hingga pengalihan fungsi lahan. Sekretaris Komisi 13 yang juga mewakili Badan Anggaran DPRD Sidoarjo Bangun Winarno menyebut, pihaknya terus berkomitmen melakukan pengawasan terhadap 16 mitra kerja. "Alhamdulillah indikator literasi numerasi di daerah baik. Di samping itu, IPM kita 81,5, terbilang tinggi," ujar Bangun.

Kami konsisten melakukan monitoring dan evaluasi (monv) terhadap dinas terkait. Langkah itu bertujuan agar program penda bisa berjalan on the track. Alhamdulillah (pada 2023) capaian program Pemkab Sidoarjo sudah 99 persen."

H USMAN

Ketua DPRD Sidoarjo



Harapannya, akselerasi pembangunan terus berlanjut ke depan. Capaian yang sudah baik jadi penyemangat untuk lebih baik lagi. Mari bersama memajukan Sidoarjo."

USMAN

Ketua DPRD Sidoarjo



Kejaksanaan Negeri Sidoarjo mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-165 untuk Kabupaten Sidoarjo. Semoga menjadi kabupaten yang maju, inovatif, produktif, sejahtera, dan bermartabat."

ROY REVALINO HERUDIANSYAH
Kepala Kejaksanaan Negeri Sidoarjo

Jalan dan Jembatan yang Bagus Makin Dongkrak Perekonomian

Kini Warga Bisa Kulakan dan Pasarkan Barang dengan Nyaman



PROYEK MONUMENTAL: Mobil melintasi flyover Djanda pada masa uji coba akhir tahun lalu. Selain Djanda, ada flyover Tank dan Krian yang digarap tahun lalu.

Akses "Ramah" dan Merata Jadi Daya Tarik Pengusaha

KETUA Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sidoarjo Sukiyanto mengatakan, akses yang baik otomatis meningkatkan produktivitas usaha. "Akses yang ramah selalu jadi daya tarik pengusaha," kata Sukiyanto. Ramah tidak hanya berarti sopan. Namun, juga berarti akses lancar, jalan bagus, dan terkoneksi. "Ramah juga berarti mengerti kebutuhan pengusaha," katanya. Kebutuhan pengusaha, antara lain, akses yang baik, kemudahan

berusaha dan berinvestasi, serta pelayanan yang baik. Saat kebutuhan tersebut dipenuhi Pemkab Sidoarjo, semakin banyak investor yang datang.

Sukiyanto mengapresiasi upaya peningkatan pembangunan infrastruktur di Sidoarjo. "Tapi, tetap harus diimbangkan, terutama pemerataannya," ujarnya. Sebab, Sidoarjo sangat luas. Sebaiknya upaya peningkatan ekonomi dilakukan di seluruh wilayah Sidoarjo. Wakil Bupati Sidoarjo Subandi

berkomitmen, ke depan upaya untuk menggenjot perekonomian tetap menjadi fokusnya. "Kami pastikan untuk mengawal program berjalan," ujar Subandi kemarin (30/1).

Dari sisi infrastruktur, betonisasi akan digenjot. Dari sisi ekonomi, program rutin tahunan bedah warung juga terus berjalan. "Sehingga, ekonomi di tingkat bawah juga bergeliat," katanya. Semuanya harus didukung dengan pelayanan yang baik. Pelayanan apa pun. Termasuk bagi pelaku usaha. (uzi/c7/any)

Jalan dan jembatan yang bagus menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan perekonomian warga di sekitarnya. Hal itu dirasakan warga Sidoarjo yang setahun terakhir mengalami perbaikan infrastruktur besar-besaran. Mulai betonisasi jalan, pembangunan lanjutan frontage road, hingga pembangunan tiga flyover sekaligus.

PENGUSAHA pengiriman sayur, M. Iswadi, merasakan sendiri bagaimana akses yang bagus bisa mendukung geliat ekonomi. "Saya bisa ambil sayur dari luar kota ke Sidoarjo. Jalan yang bagus dan tidak macet sangat-sangat membantu," katanya. Antara lain, pengiriman bisa lebih cepat sehingga menghemat operasional di jalan.

Suwarjo, warga Desa Klurak Candu, juga merasakan dampak positifnya. Tahun lalu, jembatan Klurak dibangun. Sebelumnya, hanya ada jembatan dari kayu. Saat itu akses warga ke area tambak tidak lancar sekarang. "Dulu sempat ada warga yang takut melintasi. Apalagi kalau membawa hasil tambak," ujarnya. Sebab, pernah ada warga yang tercebur sungai saat melintasi. Jadi, mereka harus memutar ke arah selatan untuk menuju ke Jalan Lingkar Timur. "Tidak hanya mendukung perekonomian, akses ke tempat pendidikan dan kesehatan juga lebih lancar," jelasnya.

Konektivitas antarwilayah dan akses yang baik merupakan hal penting untuk kesejahteraan warga. Hal tersebut disadari Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. Karena itu, berbagai program pembangunan

untuk pemerataan dan perbaikan akses terus digenjot. Caranya lewat pembangunan berbagai infrastruktur. Muhdlor mengatakan, tahun ini juga masih diisi pembangunan infrastruktur. Penataan frontage road. Pembangunan betonisasi di sekitar banyak tempat. "Kenapa betonisasi? Kami sampaikan konektivitas itu kunci pembangunan kabupaten," kata Muhdlor. Beton diyakini membuat usia jalan lebih panjang serta aman dilintasi kendaraan besar. Jika konektivitas bagus, kegiatan ekonomi apa pun itu akan meningkat. "Baik yang menyokong perekonomian, kesehatan, maupun pendidikan. Insya Allah, konsisten dan akan lebih megah," tuturnya.

Dia menyimpulkan sejumlah proyek infrastruktur yang segera digarap. Rencananya, ada pembangunan flyover Gedangan, pelebaran jalan Lingkar Timur sepanjang 10,7 kilometer, dan pembangunan overpass di atas tol Sepande. "Juga, penuntasan pembangunan frontage road sampai Buduran," ujarnya. Muhdlor menyebut, fokus pada 2024 ini juga mengarah ke revitalisasi pasar tradisional. (uzi/c7/any)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sidoarjo 165

Jawa Pos | RABU 31 JANUARI 2024

HALAMAN 18

TERBIT 100.000

Pemkab Ingin Bentuk Holding untuk Integrasikan Seluruh Fasilitas Kesehatan

Targetkan Bisa Memperbaiki Layanan dan Tekan Harga Obat



Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kabupaten Sidoarjo. Semoga bisa terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semakin jaya, semakin baik, dan bisa bersinergi bersama kami meningkatkan kondusivitas kamtibmas."

KOMBESPOL CHRISTIAN TOBING
Kapolda Sidoarjo

Khusus dalam bidang kesehatan, Pemkab Sidoarjo punya satu target khusus. Yaitu, membuat sistem *holding* yang mengintegrasikan seluruh fasilitas kesehatan (*faskes*).

Tujuannya, efisiensi di segala lini. Termasuk pengadaan obat.

PEMKAB bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo menginginkan sistem manajemen satu pintu dalam pelayanan kesehatan. "Agar bisa lebih mempermudah akses kebutuhan mengenai kesehatan. Baik itu pelayanan maupun obat," kata Kepala Dinkes Sidoarjo Penny Apridawati.

Dia lantas mencontohkan, jika suatu *faskes* memiliki kendala dan kebutuhan seperti fasilitas, obat-obatan, hingga tenaga kesehatan, mereka bisa di-cover *faskes* lain. "Bisa lebih sistematis dan efisien, tidak harus mencari sendiri-sendiri," tuturnya.

Begitu pun dari sisi anggaran. "Untuk beli obat jika sesuai kebutuhan saja di tiap rumah sakit, harganya akan tinggi. Beda ketika ada sistem borongan, harganya bisa ditekan," jelasnya.

Saat ini, RSUD Sidoarjo juga berupaya meningkatkan pelayanan. Rumah sakit yang baru saja naik menjadi tipe A itu bakal fokus menggarap gedung pelayanan terpadu (GPT). Saat ini, pelayanan di GPT masih ada di lantai 1 hingga 3. Tahun ini fasilitas di lantai 4 hingga 7 segera digarap. "Nantinya digunakan untuk subspesialis di lantai 4 dan 5 hingga manajemen di lantai 6 dan 7," jelas Plt Direktur RSUD Sidoarjo dr Syamsu Rahmadi.

Pembangunan lain yang harus diselesaikan pada 2024 adalah gedung diagnostik terpadu. Gedung yang diproyeksikan punya lima lantai itu akan menggunakan anggaran Rp 60 miliar. Sementara itu, RSUD Sidoarjo



Program Kesehatan Tahun Ini

1. Mengupayakan holding yang mengintegrasikan antar-puskesmas hingga rumah sakit.
2. Meningkatkan mutu fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) pemkab dengan melakukan akreditasi tiga puskesmas baru, yaitu Wonorejo, Tumpang, dan Tani II, menjadi rangkupa.
3. Memperkuat program universal health coverage (UHC) yang sudah berjalan.

NAIK LEVEL: Susana pelayanan Puskesmas Tani akhir tahun lalu. Puskesmas tersebut menjadi kandidat untuk naik kelas menjadi RS tipe D.

Barat (Sibar) yang sedang mengalami lonjakan pasien awal Januari juga mulai bersiap untuk melaksanakan berbagai program tahun ini. Direktur RSUD Sibar dr Abdillah Segaf Al Hadad mengatakan bahwa jumlah pasien membludak karena ada pemotongan hubungan kerja antara BPJS Kesehatan dan salah satu rumah sakit swasta di wilayah Krian per 1 Januari. "Lonjakannya bahkan terasa sejak Desember akhir lalu, banyak yang pindah dan dinujuk ke kami," tuturnya.

Hal yang paling terasa adalah jumlah pasien yang harus menjalani operasi. Biasanya sehari RSUD Sibar melayani 200 pasien, tapi kini bisa menjadi 400 pasien.

Karena itu, tahun ini akan ada penambahan, mulai tenaga kesehatan hingga spesialis. Ruang tambahan juga akan tersedia mengingat gedung manajemen terpadu milik RSUD Sibar sebentar lagi selesai. "Jadi, manajemen bakal pindah ke sana, di sini nanti buat tambahan beberapa spesialis baru," tuturnya. (exa/c7/any)

Segenap Pimpinan dan Anggota DPRD KABUPATEN SIDOARJO

Mengucapkan

SELAMAT HARI JADI KE-165 KABUPATEN SIDOARJO

Sidoarjo Gendang Melaju Berkelanjutan

Bambang Riyoko SE Wakil Ketua I
H Usman MKA Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo
Koyan SH Wakil Ketua II
Dr H Emir Perdana SY MM Wakil Ketua III

PEMERINTAH DESA RANGKAH KIDUL KECAMATAN SIDOARJO MENGUCAPKAN

SELAMAT HARI JADI KE-165 KABUPATEN SIDOARJO

H. WABUHYONO KEPALA DESA RANGKAH KIDUL

Pimpinan beserta seluruh staf Dinas Perumahan Permukiman Kota Kertosono Mengucapkan

Selamat Hari Jadi Ke-165 KABUPATEN SIDOARJO

Dr. Mochamad Buchari Syamsu, MM Kepala Dinas Perumahan Permukiman Kota Kertosono

BPJS Ketenagakerjaan Mengucapkan

Selamat Hari Jadi Ke-165 Kabupaten Sidoarjo

Novias Dewo Santoso Kepala BPJSMenengah Sidoarjo

NEO+ Mengucapkan

Selamat Hari Jadi Ke-165 Kabupaten Sidoarjo

Pemerintah Desa Larangan Kecamatan Candi Mengucapkan

SELAMAT HARI JADI KE-165 KABUPATEN SIDOARJO

Agus Siswanto Kepala Desa Larangan

PIMPINAN RESORT SELURUH STAF KEPALA DINAS PERKOTAAN UMUM ZONA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SIDOARJO MENGUCAPKAN

SELAMAT HARI JADI KE-165 KABUPATEN SIDOARJO

Dr. H. Satrio Nugroho, S.SOS., MM, MPT Kepala Dinas Perumahan Umum Kota Kertosono

Keluarga Besar MTs. TANADA Mengucapkan

HARIAN NU Ke-101 & HARI JADI KABUPATEN SIDOARJO Ke-165

PRD MTs. TANADA

SMP KEMALA BHAYANGKARI 9 WARU Mengucapkan

SELAMAT HARI JADI KE-165 KABUPATEN SIDOARJO

Sidoarjo Gendang Melaju Berkelanjutan

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Jawa Pos

Peringati Harjasda 165, Pemkab Sidoarjo Gelar Khitan Massal

Sidoarjo - HARIAN BANGSA
Pemkab Sidoarjo menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo (Harjasda) ke-165 tahun 2024.
Diantaranya menggelar khitan massal di Pendapa Delta Wibawa, Selasa (23/1) lalu. Khitan massal ini menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sidoarjo. Khitan massal itu diikuti 232 anak. Selain Bupati Ahmad Muhdlor, khitan massal ini dihadiri Forkopimda Sidoarjo.
Bupati Muhdlor mengatakan, Indeks Kesalehan Sosial (IKS) Kabupaten Sidoarjo naik 0,92 poin dari tahun sebelumnya. Tahun 2023, IKS Sidoarjo mencapai 85,45 poin.
Hal tersebut mengisyaratkan Sidoarjo termasuk kabupaten di Jatim yang memiliki indeks rasa aman dan toleransi yang tinggi.
"Hubungannya khitan dengan kesalehan



Bupati Muhdlor melihat anak yang dikhitan di Pendapa Delta Wibawa, Selasa (23/1).

sosial jawabannya adalah satu, yakni khitan berimplikasi pada saah atau tidaknya sholat," cetus Gus Muhdlor, panggilan karib Ahmad Muhdlor.
Gus Muhdlor meyakini, jika seseorang itu salatnya bagus maka akan mengikuti



Forkopimda Sidoarjo berpose bersama dengan peserta khitan massal Harjasda ke-165

perilakunya. Oleh karenanya syarat saah khitan harus dipahami sebagai awal membentuk pribadi yang soleh.

Pribadi yang jauh dari sifat-sifat buruk. "Semoga semua yang dikhitan hari ini menjadi anak-anak yang sholeh, berguna bagi kabupaten, agama dan negara," harap alumni Fisip Unair ini.
Ketua Baznas Sidoarjo M Chasbil Azis Saiju Sodar mengatakan khitan massal gratis menjadi agenda rutin memperingati Harjasda. Tahun ini digelar di dua lokasi. Sebanyak 160 anak dikhitan di Pendapa Delta Wibawa.
Sedangkan sebanyak 72 anak dikhitan di RSUD Sidoarjo Barat. "Selain memperingati Harjasda ke-165, khitan massal ini juga untuk membantu masyarakat yang terkendala mengkhitan anak-anaknya," katanya.
Dalam acara khitan massal ini, anak-anak yang dikhitan mendapatkan uang saku, tas sekolah, sarung, baju koko dan kopyah. Para bocah yang dikhitan rata-rata didampingi orang tuanya. (sta/run/adv)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD KABUPATEN SIDOARJO

Mengucapkan Selamat

Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo

165 HARJASDA 165

SIDOARJO 1859 2024
HARJASDA

31 Januari 1859 - 31 Januari 2024

Sidoarjo Gemilang Melaju Berkelanjutan

Ketua
H. Usman, M. Kes

Wakil Ketua
Bambang Riyoko, SE

Wakil Ketua
Kayan, SH

Wakil Ketua
Dr. H. Emir Firdaus, ST, MM

HARIAN
BANGSA
Koran Warga Jatim



LOE/DUTA

Kepala KPPN Sidoarjo Didi Prihadi Wibowo dalam paparan kinerja APBN di ruang rapat II KPPN Sidoarjo Selasa (30/1/24)

2024, KPPN Terus Tingkatkan Sinergi dan Koordinasi

Pendapatan Negara di Kabupaten Sidoarjo Mengalami Kenaikan Rp.1.593,93 Miliar

SIDOARJO - Sampai dengan akhir Desember 2023, KPPN(kantor pelayanan perbendaharaan negara) Sidoarjo yang diberikan tugas untuk menyalurkan dana APBN kepada satuan kerja vertikal dan transfer ke daerah di wilayah Kabupaten Sidoarjo telah menuntaskan tugasnya.

Hal ini disampaikan Didi Prihadi Wibowo dalam rilis kinerja dihadapan puluhan pegawai dan staf di ruang rapat lantai II KPPN Sidoarjo Selasa (30/1/24)

Didi Prihadi Wibowo menjelaskan, dengan dana belanja negara sebesar Rp.8.139,26M(miliar) telah terealisasi sebesar 98,64%, lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yang terealisasi 97,16% dari anggaran belanja Rp.6.491,72M. Tren positif dari penyaluran ini sebagai salah satu indikasi dari semakin berkembangnya pembangunan pada tahun 2023.

Lebih jauh Didi melanjutkan, ang-

garan belanja negara yang disalurkan terbagi menjadi dana belanja pemerintah pusat, yang dialokasikan untuk kantor vertikal kementerian/lembaga sebesar Rp. 5.714,50M yang telah direalisasikan sebesar Rp.5.622,85M atau 98,40%.

"Realisasi tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.3.274,81M atau 99,49%, belanja barang sebesar Rp.1.501,07M atau sebesar 98,45%, belanja modal sebesar Rp.846,95M atau 94,29% dan belanja bantuan sosial sebesar Rp.0,02 M atau sebesar 100%. Sedangkan dana transfer ke daerah yaitu untuk Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp.2.424,75M, yang telah disalurkan sebesar Rp.2.406,02M atau 99,23%,"ungkap Didi.

Dari realisasi diantaranya terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp.254,25M atau sebesar 100%, Dana Alokasi Umum sebesar Rp.1.188,77M atau sebesar 99,95%, Dana Transfer Khusus sebesar Rp.619,46M atau

sebesar 97,37%, Dana Insentif Fiskal Rp.21,36M atau sebesar 100% dan Dana Desa sebesar Rp.322,18M atau sebesar 99,57%.

"Pada sisi pendapatan negara di wilayah Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan nominal sebesar Rp.1.593,93M dibanding dengan periode yang sama pada tahun lalu. Pendapatan negara sampai dengan akhir tahun 2023 diperoleh dari penerimaan PPh sebesar Rp. 5.261,42M, penerimaan PPN sebesar Rp.5.660,83M, Cukai Rp.6.623,54M. Pajak lainnya Rp.52,12M, pajak perdagangan Internasional sebesar Rp.336,70M dan PNPB Rp.525,91M atau sebesar 299,70% target PNPB atau tumbuh 19,18% dari periode yang sama pada tahun lalu," jelasnya.

Selain dari kinerja penyerapan / penyaluran, keseluruhan parameter dari indikator pelaksanaan anggaran antara lain yang terdiri dari kegiatan revisi anggaran, perencanaan penggunaan dana, pengawasan belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, dispensasi dan capaian output memperoleh nilai 95,11 dengan kriteria sangat baik. • Loe



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIDOARJO



Menqueapkan:

SELAMAT
HARI JADI KABUPATEN SIDOARJO KE-165

"Sidoarjo Gemilang Melaju Berkelanjutan"

(31 Januari 1859 - 31 Januari 2024)



Ketua
H. Usman, M. Kes

Wakil Ketua
Bambang Riyoko, SE

Wakil Ketua
Kayan, SH

Wakil Ketua
Dr. H. Emir Firdaus, ST, MM

DUTA

Diedukasi Langsung Tugas Profesi Damkar dan Pilot

SIDOARJO - Puluhan anak-anak dari PG-TK Roudlotul Fatah Tanggulangin Sidoarjo diedukasi, namun kali ini terkait sarana dan prasarana tentang tugas-tugas pegawai Damkar (Pemadam Kebakaran) serta tentang profesi sebagai seorang pilot. Dengan harapan mereka tahu persis seperti apa kinerjanya.

Menurut Kepala PG-TK Roudlotul Fatah Tanggulangin, Ani Farida, S.Ag S.Pd menjelaskan kalau tema kegiatan hari ini adalah tentang profesi. Oleh karena itu anak-anak kali ini kami kenalkan bagaimana tugas seorang Damkar dan Pilot. Makanya mereka kami ajak berkunjung ke UPT Damkar Sidoarjo dan ke Rumah Pintar, untuk edukasi ke Museum Dirgantara Bandara Juanda, pada Selasa (30/1/24) pagi.

Masih menurut Ani,adi kegiatan ini kami mengenalkan anak-anak biar melihat secara langsung tentang bagaimana cara pegawai Damkar ini menjalankan tugasnya. Termasuk juga mengenalkan alat-alatnya, apa saja dan bagaimana cara mengoperasionalkannya.

"Salah satunya adalah dilaku-



Puluhan anak-anak PG -TK Roudlotul Fatah dapat edukasi profesi Damkar dan Pilot Selasa (30/1/24)

kan simulasi cara memadamkan api dengan memakai baju APD. Jadi anak-anak ini bagaikan seorang yang bertugas pemadam kebakarannya,"ujarnya.

Selain mengunjungi UPT Damkar Sidoarjo, kami lanjutkan ketempat profesi yang lain, yaitu ke rumah pintar Juanda. Di sana anak-anak juga akan melihat pesawat terbang, bagaimana menjadi pilot. "Kondisi

ini kita lakukan agar imajinasi anak-anak ini bisa terbentuk," katanya.

"Mereka bisa melihat simulasi-simulasi video-video yang telah ditayangkan di rumah pintar, profesi-profesi yang lain di Bandara Juanda. Ternyata seperti ini tugas seorang pilot. Jadi mereka bisa melihat dan merasakan secara langsung," pungkas Ani Farika.

Sementara itu terpisah, petugas Damkar Sidoarjo Asrori mengatakan kalau edukasi anak-anak sekolah itu hampir setiap hari ada saja yang berkunjung. Jadi sangat perlu sekali anak-anak diperkenalkan sejak dini tentang profesi-profesi.

"Manfaatnya sangat bagus, karena anak-anak imajinasi anak-anak sudah terbentuk sejak dini," katanya. • **Loe**

Predikat Zona Integritas WBK BPPD Sidoarjo Terancam Dicabut

Akibat Terjadinya Operasi Tangkap Tangan KPK

Sidoarjo, Bhirawa

Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diterima Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, terancam dicabut oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri dan RB).

Hal ini buntut terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di BPPD Sidoarjo, terkait dugaan

pemotongan insentif pajak dan retribusi bagi ASN.

Saat ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo

berinisial SW, sebagai tersangka pemotongan insentif ASN dengan total Rp2,7 miliar. KPK juga segera memanggil Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Dikutip dari laman www.menpan.go.id, Kementerian PAN dan RB akan mencabut predikat wilayah bebas korupsi (WBK) bagi unit/satuan kerja yang

► ke halaman 11

HARIAN
Bhirawa

Predikat Zona Integritas WBK BPPD Sidoarjo Terancam Dicabut

● Sambungan hal 1

mendapatkan predikat WBK/WBBM, namun yang dilapangan tidak memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB, Erwan Agus Purwanto, seperti dikutip dari www.menpan.go.id menyatakan, telah mencabut Predikat WBK pada Pengadilan Negeri Surabaya yang diberikan pada 2019, dan dicabut sejak 3 Februari 2022 lalu.

Pencabutan ini dilatarbelakangi oleh ditetapkannya hakim dan panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai tersangka kasus penyuapan.

Kemudian, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta juga kehilangan predikat WBK sejak 14 Juni 2022 lalu, karena ditetapkannya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan sebagai tersangka kasus penyuapan oleh KPK. Unit kerja ini mendapat predikat WBK pada 2014 lalu.

Predikat WBK Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur juga dicabut, sejak 30 Januari 2022 lalu akibat ditetap-



Banner di pos jaga Kantor BPPD Kabupaten Sidoarjo yang menearangkan bahwa BPPD Sidoarjo sebagai kawasan WBK

antongi predikat ZI WBK pada tahun 2022 lalu. Saat ini OPD yang sudah mengantongi ZI WBK di Kabupaten Sidoarjo diantaranya adalah BKD, Dispendukcapil, BPPD, Kecamatan Taman dan Dinas Penanaman Modal/PTSP. Sedangkan yang mengantongi predikat ZI/WBBM adalah Kecamatan Sukodono dan RSUD Sidoarjo.

Sementara itu, dilansir dari Antara, Penyidik KPK telah menetapkan tersangka dan menahan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo bernama Siska Wati (SW), dalam kasus

hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menerangkan kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun dan atas perolehan tersebut ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus bendahara secara sepihak melakukan pemotongan insentif dari para ASN tersebut. Pemotongan dan penerimaan dari dana

Juni 2022 lalu, akibat keterlambatan penuntasan kasus korupsi yang dipimpinnya Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur sebagai terdakwa tindak pidana gratifikasi dan pemerasan, atas proyek pembangunan infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur menandatangani WBK sejak 2020.

Tidak hanya dilakukan pencabutan predikat, Kementerian PAN dan RB, juga melarang unit/satuan kerja atau kawasan tersebut diajukan lagi untuk mendapatkan predikat menuju WBK selama dua tahun setelah penetapan pencabutan diterbitkan.

Hal ini sesuai dengan poin C Bab IV yang termaktub dalam Peraturan Menteri PANRB No 90/2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah terkait Pencabutan Predikat WBK/WBBM.

Kementerian PANRB mengimbau kepada seluruh unit/satuan kerja atau kawasan yang dicabut predikatnya untuk segera melakukan perbaikan pada sistem pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pimpinan unit/satuan kerja atau kawasan juga harus meningkatkan pengawasan terhadap integritas aparatur di wilayahnya.

Data dari Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo, BPPD Ka-

dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

"Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka SW untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan 14 Februari 2024 di Rutan. Cabang KPK," kata Wakil Ketua KPK Nuzul Ghufhon di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Ghufhon menerangkan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW. Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT tersebut ini diamankan uang tunai ini sejumlah sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar di tahun 2023. Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan

insentif dimaksud diantaranya untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo.

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW pada para ASN di beberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi diantaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan yang dikenakan mencapai 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima. Penyerahan uang tersebut dilakukan secara tunai dan dikoordinir oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar. Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW akan dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. [kus.iib]



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Bapemperda Masukkan 21 Raperda dalam Propemperda 2024



USMAN

Ketua DPRD Sidoarjo



KAYAN

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo



ADHY SAMSETYO

Ketua Bapemperda DPRD Sidoarjo

KOTA-Sebanyak 21 rancangan peraturan daerah (raperda) akan dibahas oleh DPRD Sidoarjo tahun ini. Keputusan tersebut tercantum dalam rapat paripurna yang digelar akhir tahun lalu.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sidoarjo Adhy Samsetyo mengatakan, 21 raperda yang akan dibahas tahun depan tersebut merupakan hasil usulan dari DPRD Sidoarjo serta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Ada usulan raperda baru serta raperda lanjutan yang masih dalam pembahasan," ujarnya.

Dia menjelaskan, dari 21 raperda yang masuk dalam program tersebut, tujuh di antaranya berasal dari usulan DPRD Sidoarjo. Sementara 14 raperda lainnya diusulkan oleh Peme-

rintah Kabupaten Sidoarjo.

Beberapa raperda yang menjadi usulan DPRD adalah raperda penyelenggaraan kesehatan hewan yang diusulkan oleh Komisi B. Kemudian raperda perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas yang merupakan usulan Komisi D.

Sedangkan raperda usulan Pemkab Sidoarjo antara lain raperda pelaksanaan usaha kesehatan sekolah/madrasah yang diusulkan bagian Kesra, serta raperda pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman umum yang diusulkan Bappeda.

Deny menyebutkan, proses pembahasan dan penetapan raperda akan melibatkan berbagai pihak terkait. Termasuk anggota DPRD, eksekutif, serta

berbagai elemen masyarakat," ujarnya.

Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap raperda yang disahkan nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat Sidoarjo serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo Usman mengaku pihaknya berkomitmen untuk menjalankan proses pembahasan raperda itu secara transparan dan partisipatif. Sehingga keputusan yang diambil akan mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara lebih luas.

Dia berharap semua proses pembahasan hingga pengesahan raperda dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.



DITETAPKAN: Rapat paripurna penetapan propemperda 2024 di kantor DPRD Sidoarjo.

Menurut dia, setiap perda yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan.

"Terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat," pungkasnya.

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Kayan juga menyampaikan rangkuman hasil kerja legislatif selama 2023. Menunjukkan produktivitas dan komitmen dalam menghasilkan regulasi yang mendorong pembangunan daerah.

Menurut Kayan, berdasarkan

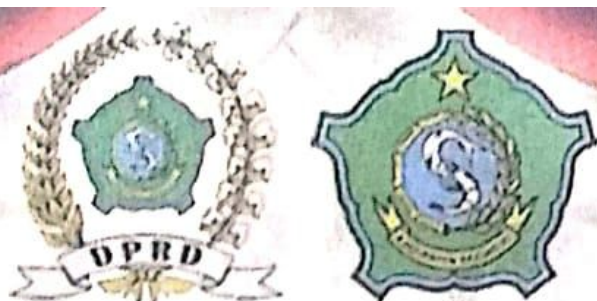
Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2023, DPRD Sidoarjo telah menetapkan 23 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Angka itu mencakup 6 inisiatif dari DPRD dan 17 usulan eksekutif.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 7 Raperda telah berhasil melewati proses dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Sementara itu, masih terdapat 9 raperda yang sedang dalam tahap pembahasan. "Kami optimistis bahwa

proses ini dapat diselesaikan pada semester 1 tahun ini," ujarnya.

Selama 2023, DPRD Sidoarjo juga aktif dalam menetapkan produk hukum lainnya. Terdapat 26 berita acara persetujuan bersama dan kesepakatan bersama yang berhasil ditetapkan, menunjukkan sinergi antara berbagai kepentingan.

Selain itu, tercatat 4 keputusan pimpinan dan 39 keputusan DPRD, memberikan dasar hukum bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat. (nis/vga)



PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIDOARJO

MENGUCAPKAN

Selamat dan Sukses

**HARI JADI
KABUPATEN
SIDOARJO
KE-165**



SIDOARJO 1959 - 2024

HARJASDA

**SIDOARJO GEMILANG
MELAJU KEBERLANJUTAN**



H Usman M. Kes
Ketua

Bambang Riyoko, SE
Wakil Ketua

Kayan, SH
Wakil Ketua

Dr. Emir Firdaus, ST, MM
Wakil Ketua



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



MEGAH: Gedung Pusat Terpadu dan Gedung Laboratorium RSUD Sidoarjo.

Tingkatkan Fasilitas Kesehatan, Resmikan Gedung Pusat Terpadu dan Gedung Laboratorium RSUD Sidoarjo

KOTA-Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo kini memiliki Gedung Pusat Terpadu dan Gedung Laboratorium Kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor telah meresmikan gedung yang berwarna cat putih dengan tinggi 7 lantai tersebut.

Dibangunnya gedung terpadu 7 lantai diharapkan akan lebih meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Oleh karenanya RSUD Sidoarjo terus menambah tenaga spesialis serta menambah alat kesehatan seiring dengan naik kelasnya RSUD menjadi tipe A.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor yang berhasil mendorong peningkatan layanan kesehatan di RSUD Sidoarjo, dari yang awalnya tipe B naik kelas menjadi tipe A.

Budi juga menyampaikan bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan satu-satunya pemda yang memiliki Rumah Sakit Umum Daerah dengan tipe A di Indonesia sehingga harus bergerak cepat memberikan layanan kesehatan yang terbaik.

"Menjadi RS tipe A harus memiliki paling tidak tiga layanan kesehatan untuk penyakit stroke, jantung, dan kanker. Karena tiga

penyakit tersebut saat ini mendominasi penyebab seseorang meninggal dunia," ujarnya.

Untuk itu, Menkes Budi juga mengajak Bupati Sidoarjo agar tetap menjaga masyarakat agar tetap sehat yaitu dengan penyuluhan di puskesmas, posyandu, kader kesehatan untuk menggalakkan pentingnya hidup sehat kepada masyarakat. "Tugas kita adalah menjaga masyarakat tetap sehat jauh lebih penting, dari pada harus mengobati masyarakat saat sakit," tutupnya.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengatakan, setelah RSUD Sidoarjo menjadi satu-satunya rumah sakit kabupaten yang bertipe A maka harus berubah menjadi lebih baik dari segi apapun.

"Berubahnya kelas RSUD Sidoarjo tidak dapat dipisahkan dari standar rumah sakit yang naik. Baik dari segi sarana prasarana maupun Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatannya, serta pelayanannya, jangan lantas menjadikan kita berpuas diri namun tetaplah menjadi *fastabihul khoiroh* (berlomba-lomba dalam kebaikan)," katanya.

Bupati yang akrab dipanggil Gus Muhdlor itu juga menekankan pentingnya fasilitas kesehatan yang modern untuk pelayanan RSUD Sidoarjo secara optimal.

"Konsekuensi kami setelah menjadi RS tipe A adalah meningkatkan pelayanan kesehatan dan kenyamanan pasien baik rujukan kabupaten/kota lain maupun masyarakat Sidoarjo sendiri," tambahnya. (sai/vga)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risdalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

dlor



Pelayanan Publik Sidoarjo Masuk Zona Hijau Kualitas Tertinggi, Ombudsman RI Beri Nilai 95,95

KOTA-Kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendapat apresiasi dari Ombudsman RI. Lembaga pengawas pelayanan publik pemerintah itu menilai kepatuhan pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat baik sehingga masuk dalam kategori kabupaten dengan pelayanan publik zona hijau dengan kualitas tertinggi.

Nilai yang diberikan Ombudsman RI kepada Pemkab Sidoarjo tahun 2023 sebesar 95,95. Penilaian itu lebih baik dari tahun sebelumnya yakni 84,46. Naiknya penilaian tersebut menjadikan Sidoarjo masuk dalam 5 besar kab/kota di Jatim dengan kepatuhan pelayanan publik zona hijau kualitas tertinggi. Lima kab/kota itu yakni Surabaya, Sidoarjo, Tuban, Nganjuk dan Jember.

Penyerahan piagam penghargaan Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik tahun 2023 oleh Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor yang diwakili Asisten III dr. Atok Irawan di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menyampaikan, dengan naiknya penilaian tersebut membawa pelayanan publik Sidoarjo naik kelas dari zona kualitas tinggi menjadi zona hijau kualitas tertinggi. (sal/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



CEGAH KEMACETAN: Flyover Djuanda menjadi salah satu mega proyek sinergitas antara Pemkab Sidoarjo dan pemerintah pusat.

Realisasikan Pembangunan Infrastruktur yang Signifikan

KOTA-Pembangunan infrastruktur di Sidoarjo sangat signifikan. Sinergitas antara Pemkab Sidoarjo dengan pemerintah pusat membuahkan sejumlah proyek pembangunan yang luar biasa. Pertama, flyover (FO) Djuanda. Proyek Kementerian PUPR itu jadi solusi kemacetan di area Aloha. FO A untuk arah Sidoarjo - Juanda sepanjang 435 meter dan FO B untuk arah Juanda - Surabaya sepanjang 423 meter. Masing-masing selebar 9 meter. Pemkab Sidoarjo dan Kementerian PUPR berbagi peran. Pembebasan lahannya, jadi kewenangan Pemkab

Sidoarjo.

Sedangkan proyek fisiknya dikerjakan Kementerian PUPR. Dukungan lainnya, Pemkab Sidoarjo menuntaskan penuntasan frontage road (FR) Gedangan agar kemacetan terurai saat proses pengerjaan fly over Djuanda berlangsung.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor memastikan secara langsung pengerjaan FR selesai sebelum proyek FO itu berlangsung.

"Kami dukung dengan percepatan penyelesaian FR dan juga pelebaran jalan di sisi barat FO Djuanda," terang Muhdlor. Jalan sisi barat tersebut yakni

Jalan Joyoboyo di pertigaan Bangah. Jalan tersebut dilebarkan 4 meter sepanjang 225 meter. Sehingga, Jalan Ahmad Yani sisi barat bisa mengurai kemacetan saat FO Djuanda digarap. Kini, Pemkab Sidoarjo berencana melanjutkan pelebaran jalan tersebut.

Jalan Raya Waru di depan RS Mitra Keluarga Waru dalam waktu dekat akan dilebarkan 7 meter sepanjang 200 meter. Saat ini, penyiapan lahan pelebaran sedang dilakukan. Upaya lainnya, Pemkab Sidoarjo juga membangun FR lanjutan tahun ini.

Lokasinya di sisi utara FO Djuanda. FR digarap sepanjang 1098 meter dari depan Perumahan Delta Sari hingga di dekat Pabrik Paku Waru. Akhir tahun ini proyek tersebut selesai.

"Ini bentuk sinergitas yang nyata antara pemerintah pusat dan daerah," ujar Muhdlor.

Kedua, proyek FO Tank dan FO Krian dari Kementerian Perhubungan. FO Krian dibangun sepanjang 700 meter, ditambah seratus meter di ujung utara dan 100 meter di ujung selatan sebagai turunan flyover. Total 900 meter.

Keduanya untuk mengurai kemacetan agar pengendara tak perlu terjebak lampu merah karena menunggu kereta api melintas. Bentuk sinerginya, Pemerintah Pusat yang membangun dan Pemkab Sidoarjo yang menyiapkan lahannya. Tak hanya itu, Pemkab

Sidoarjo juga menambahkan pemanis. Di bawah FO Krian, Pemkab Sidoarjo juga membangun taman agar suasana FO Krian lebih asri dan nyaman. Ketua Tim Percepatan Pembangunan Flyover Krian dan Tarik, Bachruni Ariyawan menyebut taman dibangun agar ada ruang terbuka hijau (RTH) yang bisa dimanfaatkan warga.

"Kami bangun ornamen hiasan juga yang berciri khas Sidoarjo, seperti gambar udang dan bandeng yang terpasang di dinding fly over Krian," katanya. (saliya)



99 Persen Pemilih Sudah Rekam E-KTP

KOTA-Kabupaten Sidoarjo mencatat pencapaian luar biasa dalam perekaman e-KTP menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum. Data terbaru di akhir Januari menunjukkan bahwa tingkat perekaman mencapai 99,60 persen. Hal itu mencerminkan partisipasi masyarakat yang luar biasa dalam mendukung proses demokrasi.



Kegiatan ini digelar serentak di Jateng, Yogyakarta, Sleman dan Jatim,"

MUHAMMAD ATHO'ILLAH
Penyakit (P2P) Dinkes Sidoarjo

kan, imunisasi polio sangat penting bagi anak. Tujuannya untuk mencegah penyakit polio yang kemungkinan terjadi.

"Kegiatan ini digelar serentak di Jateng, Yogyakarta, Sleman dan Jatim," paparnya.

Imunisasi polio digelar lantaran di Jateng dan Sleman banyak ditemukan anak yang positif polio. Sehingga imunisasi polio penting

Sebagai upaya penun-
tasan pemilih pemula, pro-
gram Jebol Goes to School
yang diadakan oleh Dinas
Kependudukan dan Cata-
tan Sipil. Digelar setiap Se-
lasi dan Rabu, program ter-
sebut terbukti efektif.

Kepala Dispendukcapil
Sidoarjo Reddy Kusuma
mengatakan, terobosan
lebih lanjut telah diterap-
kan sejak Desember 2023
hingga 14 Februari 2024.
Perekaman KTP dan
aktivasi IKD kini dapat
diakses oleh masyarakat
setiap Sabtu dan Minggu.
"Mulai pukul 08.00 hingga
12.00," katanya.

Keputusan itu bertujuan
untuk memudahkan warga
agar dapat melakukan
perekaman tanpa meng-
ganggu jadwal harian
mereka. Ketersediaan laya-
nan pada akhir pekan di-
harapkan dapat memas-
tikan bahwa seluruh warga
dapat terdaftar dengan
lancar, terutama mereka
yang memiliki keterbatasan
waktu pada hari kerja.

Partisipasi aktif masya-
rakat juga diapresiasi me-
lalui ajakan untuk hadir
ke Mal Pelayanan Publik
(MPP) lingkaran timur. Ke-
berhasilan Pemilu tidak
hanya terletak pada ke-
lengkapan administratif,
tetapi juga pada keterlibat-
an serta keterwakilan se-
luruh lapisan masyarakat.

Reddy mengucapkan
terima kasih atas semangat
dan dukungan masyarakat
Sidoarjo dalam menjalan-
kan proses rekaman e-KTP.
Dia berharap capaian tinggi
ini menjadi landasan yang
kuat untuk penyeleng-
garaan Pemilu yang demo-
kratis dan inklusif. Karena
itu ia berharap mahasiswa
asli Sidoarjo agar berkenan
menyempatkan pulang
untuk membantu kota
kelahirannya.

Semangat gotong ro-
yong tersebut sangat di-
butuhkan untuk menya-
darkan masyarakat bah-
wa imunisasi Polio itu
sangat penting bagi
Health Imunity.

Sementara itu, Kabid
Pencegahan dan Pengen-
dalian Penyakit (P2P)

Dinkes Sidoarjo, Muham-
mad Atho'illah menjelas-

agar terhindar dari penya-
kit tersebut. (nis/vga)



H. AHMAD MUHDLOR ALI, S.IP
BUPATI SIDOARJO



H. SUBANDI, S.H
WAKIL BUPATI SIDOARJO



bankjatim
**Sahabat
umkm**



HARJASDA
SIDOARJO GEMILANG
MELAJU BERKELANJUTAN



bankjatim
JConnect

DESA PENDULUM DEVISA PROGRAM UMKM NAIK KELAS

RADAR SIDOARJO

RABU, 31 JANUARI 2024 | 19

Kecamatan Wonoayu

Usaha Furniture, Tembus hingga Pasar Asia, Eropa dan Amerika

PELAKU Unit Mikro Kecil Menengah (UMKM) di bidang furniture asal Kecamatan Wonoayu, Rohmat patut diacungi jempol. Usahanya laku hingga mancanegara. Pada tahun 2012, Rahmat mulai membuat produk furniture secara mandiri. Produk yang dihasilkan ia jual di depan rumahnya. Kemudian ia menghubungi beberapa pabrik yang diketahuinya. Ia menawarkan

jasanya ke beberapa pabrik yang ia kunjungi. Seperti di Sidoarjo, Kediri, Pasuruan, Gresik, dan Mojokerto. Dari situ tak sedikit pabrik yang tertarik untuk menggunakan jasanya.

"Produksinya kadang saya yang bantu, saya buatkan sampelnya," terangnya.

Produksi tidak hanya dilakukan di Kecamatan Wonoayu. Melainkan diberbagai tempat seperti di Krembung dan berbagai Kecamatan di Gresik. Rahmat menghandle seluruh kegiatan produksi. Mulai dari desain hingga produknya siap jadi. Terdapat banyak jenis produk yang ia buat seperti kursi, meja, keranjang dan lain sebagainya.

Tak main-main produk yang ia buat tersebut laku hingga ke pasar mancanegara. Seperti Jepang, Eropa dan Amerika. Hampir seluruh jenis produknya diterima dan mendapatkan respon positif. "Sekali kirim kita bisa sebanyak 1.500 pcs, dalam satu bulan rata-rata kita kirim dua kontainer," katanya.

Keuntungan bersih yang ia dapatkan per bulan dapat mencapai Rp 25 juta hingga Rp 30 juta. Bahkan pernah mencapai miliaran saat produknya laku hingga Amerika. (sai/vga)

Nama: Rohmat
Jenis Usaha: Furniture
Pemasaran: Asia, Eropa, Amerika
Alamat: Jalan Raya Ketawang
RT1/RW1 Wonoayu
Media sosial: -

Kecamatan Sidoarjo

Seni Mengukir Cantik Aksesoris Wanita



Nama: Tiwung Dian Ekawati
Jenis usaha: Aksesoris
Alamat: Bumi Suko Indah BB/04,
Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo,
Pemasaran: Indonesia, Amerika,
Belanda, dan Norwegia.
Nama sosmed:
IG: dian.arkaseoris

seoris
dengan karyanya yang
unik dan original.
Sejak 2007, Dian
membangun perjalan
bisnisnya dalam

memasuki dunia pameran pada 2008. Meskipun usianya telah mencapai 60 tahun, semangat dan dedikasinya dalam menciptakan aksesoris tak pernah luntur. Wanita yang tinggal di Perumahan Bumi Suko Indah tersebut mengatakan bahwa setiap karya yang dihasilkannya mencerminkan keindahan dan keunikan.

Salah satu ciri khas dari aksesoris buatan tangan Dian adalah penggunaan kawat tembaga asli sebagai bahan dasar. Kawat itu kemudian dibentuk dan dililitkan dengan cermat untuk menciptakan hiasan yang memukau.

Keistimewaan tambahan hadir dalam penambahan pemanis, seperti batu giok asli dari Tiongkok, batu alam atau mineral asli dari Banyuwangi, limbah pecahan kaca, dan beberapa butiran mutiara asli dari Lombok, Nusa Tenggara Barat.

"Keunikan aksesoris saya terletak pada penggunaan bahan-bahan berkualitas tinggi dan orisinal. Saya selalu berusaha membedakan karya saya dengan yang ada di pasaran," ungkapnya. (nis/vga)



Kecamatan Krian

Dirintis Sejak 1994, Produksi Pakan Burung, Omset Tembus Rp 120 Juta Perbulan

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) UD. Madura Koong yang berlokasi di Jalan Alam Pesona 2, Dusun Sidorame, Desa Sidorejo, Kecamatan Krian ini bergerak dibidang pakan burung. Usaha ini dirintis 1994 oleh Jali dan Istinah. Saat ini usaha tersebut diteruskan Muhammad Puko Danu, putra dari pasangan Jali dan Istinah.

Di tangan Puko, begitu Muhammad Puko Danu kerap disapa, produk tersebut berhasil dipasarkan hingga ke seluruh Jawa, Bali dan Kalimantan.

Harga jual pakan burung Madura Koong dibandrol sangat terjangkau. Yakni hanya Rp 8.500 hingga Rp 9.500.

Harga tersebut tergantung pada bahan yang digunakan. Namun, harga jual dipasaran bisa mencapai Rp 10 ribu hingga Rp 14 ribu tergantung lokasi pemasarannya. "Kalau di luar Jawa harga lebih tinggi dibandingkan di Jawa," kata Puko.

Dari usaha turun-temurun ini, Puko mampu memproduksi hingga satu ton per hari. Dia dibantu sembilan karyawan yang berasal dari warga sekitar.

Produk Madura Koong ini terdiri lima varian. Diantaranya, Kenari Super, Grent Multi Super, Jayandaru, Terkuku Super, dan Cendel Super.

"Awalnya dulu hanya jual pakan burung perkutut saja, kemudian berjalannya waktu semakin bertambah untuk lima jenis burung," ujar Puko.

Hasilnya, Puko mampu meraih omset hingga Rp 120 juta per bulan. "Pemasarannya melalui agen besar dan menyuplai ke toko-toko kecil. Sekarang mulai merambah di Online, baik Instagram Facebook maupun Tik-Tok," pengkasnya. (dik/nug)

Nama: Muhammad Puko Danu
Jenis Usaha: Pakan Burung
Pemasaran: Jawa, Bali, Kalimantan
Alamat: Jalan Alam Pesona 2, Dusun
Sidorejo, Desa Sidorejo,
Kecamatan Krian.
Instagram: madurakoong.



Kecamatan Porong

Tepung Bumbu Bafira, Laku di Penjuru Nusantara

SIAPA yang tak mengenal tepung bumbu? Berbagai jenis merek diperdagangkan di pasaran. Salah satunya tepung bumbu Bafira. Tepung bumbu tersebut merupakan produk Unit Mikro Kecil Menengah (UMKM) asli Kecamatan Porong. Produk yang sangat layak menjadi pilihan ibu-ibu di rumah. Sebab memiliki garansi dengan harga yang terjangkau.

Owner Tepung Bumbu Bafira, Fila Candra Setiawati mengatakan, produk buatannya memiliki banyak keunggulan.

Yakni tersedianya beberapa varian rasa dan krispinya yang dapat bertahan lama. Kualitas produknya terjamin berkualitas. Terbukti banyaknya pelanggan yang datang dari berbagai daerah di Nusantara.

"Produk kami sudah terjual ke seluruh Indonesia, ada Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan sebagainya," ucap Fila saat ditemui di Gallery Toko Bafira di Desa Glagah-arum, Porong.

Dia yakin kualitas produknya

tak kalah dengan yang lainnya. Sebab ia banyak belajar sebelum memutuskan membuat produk tepung tersebut.

Saat ini produknya telah mempunyai 12 varian tepung bumbu. Yakni original, pedas, ayam premium, kriuk, donat, pizza, ote-ote (bakwan), pisang crispy, ikan wader pengkah, ikan wader teri, bakso dan ayam bacem.

Harganya sangat terjangkau, dimulai dari Rp 20 ribu per kilogram serta terdapat potongan harga bagi reseller.

Dari penjualan produknya tersebut, Fila mengaku mendapatkan omset Rp 15 juta per bulan. (sai/vga)

Nama: Fila Candra Setiawati
Jenis usaha: Tepung bumbu Bafira
Alamat: Gallery Toko Bafira di Desa
Glagah-arum, Porong,
Pemasaran: Kalimantan, Sulawesi,
Sumatera
Nama sosmed: IG:
@tepungbumbu_sertaguna



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Kecamatan Candi

Venza Butik dan Griya Jahit Memukau Dunia Fashion dengan Karya

VENZA, butik dan griya jahit yang berdiri sejak 2011 mengukir prestasi gemilang dalam dunia fashion dengan fokus pada busana wastra berkualitas butik. Dikenal sebagai fashion designer yang berdedikasi pada produksi fashion custom, VENZA mampu memikat hati pelanggan baik secara online maupun offline.

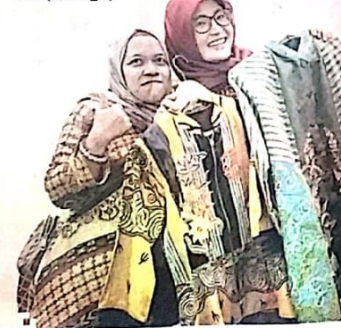
Pemilik butik Wiwid Jumrotul Ula dan Jaelani Hamzah menceritakan, usahanya awalnya bergerak dalam busana muslimah. VENZA berkembang pesat dengan permintaan tinggi untuk kebaya. Dari kebaya akad hingga kebaya pernikahan, karya-karya VENZA telah melintasi berbagai kebutuhan fashion, termasuk kebaya wisuda dan kebaya pesta/kondangan.

Lebih dari satu dasawarsa, karya-karya VENZA seperti kebaya, gaun, dress, busana muslimah, tenun, songket, jumputan, eoprint, dan batik telah merambah berbagai wilayah Indonesia dan mancanegara. VENZA menjadi pelopor dalam melestarikan busana wastra berbahan batik, tenun, eoprint, dan kain-kain hand made dengan proses produksi

yang menjunjung tinggi konsep home industri.

Dalam fokusnya saat ini, VENZA menciptakan busana wastra dengan kombinasi bordir dan aplikasi hand made. Sebagai pemilik VENZA, Wiwid menciptakan ruang bagi inovasi dan pengembangan produk fashion.

Harga produk yang terjangkau, dengan biaya jahit mulai dari Rp 400 ribu membuat VENZA menjadi pilihan utama bagi pecinta fashion yang meng-



harga tinggi kualitas.

(nis/vga)

Jenis usaha: Fashion

Alamat: Jl. Jenderal Sudirman VII no. 4 Perum Taman Jenggala, Larangan-Candi-Sidoarjo
Pemasaan: Sidoarjo, Surabaya, Pasuruan, Gresik, Malang, Jakarta, Padang, Riau, Bali, Bandung, Balikpapan, Samarinda, Papua, Hongkong, Singapura, Belanda, Qatar
Nama sosmed: VENZA Designer

Kecamatan Taman

Sarung Tangan Baseball Made In Sidoarjo Tembus Pasar Jepang, Omset Hingga Rp 1 Miliar

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) PT. Sinar Abadi Guna yang bergerak dalam pembuatan sarung tangan baseball dan golf yang dirintis Titik Suparmi ini patut diacungi jempol. Usaha yang berlokasi di Dusun Penambangan RT 16/RW 04, Desa Krembangan, Kecamatan Taman tersebut kini telah berhasil menembus pasar Jepang, Korea dan Belgia.

Titik Suparmi mengatakan, perusahaan sarung tangan baseball dan golf miliknya berdiri mulai Juni 2008, sebuah perusahaan ekspor dan impor yang bekerja sama dengan buyer dari Jepang. "Bahan sarung tangan dari sintetis, semua bahan impor dari Jepang, Korea, juga ada yang dari China per lengkapannya, kalau aksesoris yang kecil-kecil itu dari lokal," ujarnya.

Sebelum memulai usahanya, Titik bekerja di sebuah perusahaan sarung tangan di Surabaya. Dirinya bekerja selama 10 tahun, dengan target yang sudah ditetapkan sendiri. Selebihnya, akan digunakan untuk

membuat usaha. "Berawal dari usaha kecil-kecilan yang awalnya 5 sampai 10 mesin, awalnya belum ada cutting, finishing, hanya ada jahit," imbuhnya.

Dengan semangat pantang menyerah, dia berusaha untuk mengembangkan usahanya dengan memperbanyak relasi. Akhirnya, dia dipertemukan dengan rekannya berkebangsaan Jepang yang tinggal di Yogyakarta.

Saat awal merintis usahanya, pesanan sudah banyak dari Jepang. Lambat laun perusahaannya tidak hanya mengekspor sarung tangan ke Jepang, tetapi juga merambah pasar Korea hingga ke Belgia.

Alhasil, Titik yang mendirikan perusahaan seorang diri mampu meraih omset Rp 700 juta hingga Rp 1 miliar per bulan. Untuk mendukung usahanya, kini dia mempunyai 100 karyawan. (dik/nug)



Nama: Titik Suparmi

Jenis usaha: Sarung Tangan

Pemasaan: Jepang, Korea dan Belgia
Alamat: Dusun Penambangan RT 16/RW 04, Desa Krembangan, Kecamatan Taman, Instagram: sag_glove2008

layanan: fari



Menkes Resmikan Gedung Pusat Terpadu dan Laboratorium RSUD Sidoarjo

Sidoarjo, Memorandum

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo kini memiliki dua gedung baru. Yakni, gedung pusat terpadu dan gedung laboratorium kesehatan. Minggu (28/1), Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin bersama Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali meresmikan gedung tujuh lantai bercat putih itu.

Diharapkan gedung terpadu itu akan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Oleh karenanya RSUD Sidoarjo terus menambah tenaga spesialis serta menambah alat kesehatan seiring dengan naik kelasnya RSUD menjadi tipe A.

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor yang berhasil mendorong peningkatan layanan kesehatan di RSUD Sidoarjo. Dari awal naiknya kelas di tipe A, Budi men-

paikan bahwa Kabupaten



Bupati Ahmad Muhdlor Ali

paten Sidoarjo merupakan satu-satunya pemerintah daerah yang memiliki RSUD tipe A di Indonesia sehingga harus bergerak cepat memberikan layanan kesehatan yang terbaik.

"Menjadi RSUD tipe A harus memiliki paling tidak tiga layanan kesehatan untuk penyakit stroke, jantung, dan kanker. Karena tiga penyakit tersebut saat ini mendominasi penyebab seseorang meninggal dunia," ujarnya.

Budi menegaskan selain adanya sarana dan prasarana maka penting untuk menyediakan dokter spesialis penyakit tersebut.

"Jika alatnya sudah ada, yang menjadi pekerjaan rumah (PR) kami adalah SDM (sumber daya manusia)-nya yang saat ini masih kurang, sehingga kami juga menyediakan 2.000 beasiswa untuk dokter spesialis," terangnya.

Untuk itu, Menkes juga mengajak Bupati Sidoarjo agar tetap menjaga masyarakat agar tetap sehat yaitu dengan penyuluhan di puskesmas, posyandu, kader kesehatan untuk menggalakan pentingnya hidup sehat kepada masyarakat.

"Tugas kita adalah menjaga masyarakat tetap sehat jauh lebih penting, dari pada harus mengobati masyarakat saat sakit," tutupnya.

Bupati Ahmad Muhdlor Ali dalam sambutannya mengatakan, setelah RSUD Sidoarjo menjadi satu-satunya rumah sakit kabupaten yang bertipe A maka harus berubah menjadi lebih baik dari segi apapun.

"Berubahnya kelas RSUD Sidoarjo tidak dapat dipisahkan dari standar rumah sakit yang naik. Baik dari

maupun SDM kesehatannya, serta pelayanannya, jangan lantas menjadikan kita berpuas diri namun tetaplah menjadi *fastabihul khoir* (berlomba-lomba dalam kebaikan)," katanya.

Bupati yang akrab dipanggil Gus Muhdlor itu juga menekankan pentingnya fasilitas kesehatan yang modern untuk melayani masyarakat Sidoarjo



Menkes Budi Gunadi Sadikin bersama Bupati Ahmad Muhdlor Ali mengunting rangkaian bunga tanda peresmian dua gedung baru RSUD Sidoarjo.



Bupati mendampingi rombongan Menkes meninjau RSUD Sidoarjo.



layanan prioritas Kementerian Kesehatan. Di antaranya stroke, kanker, kardiovaskuler, penyakit infeksi emerging, kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, uronefrologi, respirasi dan TBC, diabetes mellitus, dan gastrohepatologi.

"Dengan resminya gedung pusat terpadu ini, maka kami operasionalkan lantai satu, dua, dan tiga untuk layanan

farmasi, laboratorium, rehab medik, urologi, bedah digestif, pediatri, serta bedah *tono-kardiovaskuler*," tuturnya.

Ia juga menambahkan selanjutnya di 2024 juga akan dioperasikan lantai empat, lima, enam, dan tujuh. "Tahun ini kami targetkan sub spesialis untuk *support* rumah sakit kelas A Sidoarjo akan beroperasi semua," jelasnya. (adv/kri/jok)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Ruang Pelayanan 7 Cabang Perumda Delta Tirta Sidoarjo Bakal Dirombak Total

Sidoarjo, Memo X

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali menunjukkan perhatiannya yang besar terhadap kondisi ruang pelayanan pelanggan Perumda Delta Tirta Sidoarjo.

Menyikapi hal itu, Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo, Dwi Hary Soeryadi me-

nilai perlunya pembaruan secara menyeluruh ruang pelayanan. Hal ini mengutip pernyataan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali yakni soal pembaruan itu sangat penting.

Dwi memulai langkah besar dengan merombak total interior lobi Kantor Perumda Delta Tirta pusat dan toilet tamu. Menciptakan suasana layaknya lobi dan toilet di hotel bintang 4.

“Langkah ini sebagai tonggak awal untuk meningkatkan kualitas pelayanan,” ujar Dwi Hary Soeryadi kepada Memo X, Sabtu (27/01/2024).

Bukan hanya kantor pusat, Ta-



RENOVASI - Ruang layanan di Kantor Perumda Delta Tirta yang ada di Jl Pahlawan Sidoarjo sudah dirombak dan direnovasi total, Sabtu (27/01/2024).

hun 2024 ini, lanjut Dwii pihaknya akan menjadikan setiap kantor cabang Perumda Delta Tirta memiliki tatahan yang sama eksklusif. “Setiap cabang harus memberikan pengalaman pelayanan yang istimewa,” ungkapnya.

Untuk mewujudkan hal itu, sudah dialokasikan anggaran tahun ini untuk merombak ruang lobi pelayanan pelanggan di 7 cabang Perumda Delta Tirta. Pembaruan itu diharapkan tidak hanya meningkatkan kenyamanan pelanggan, akan tetapi juga menciptakan kesan indah, nyaman dan profesional.

“Beberapa langkah inovatif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pelayanan publik di bidang air bersih dan sanitasi yang dikelola Perumda Delta Tirta Sidoarjo,” pungkasnya. (par/wan)

Gus Muhdlor Maksimalkan Sumur Pompa

Sidoarjo, Memo X

Banjir yang terjadi di SMPN 2 Tanggulangin di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo beberapa hari lalu dilaporkan surutnya lama. Kondisi ini berbeda dengan tahun lalu, pasca hujan lebat air yang menggenangi halaman sekolah cepat surut. Hal ini karena rumah pompa bisa bekerja maksimal.

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan yang dilakukan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali diketahui salah satu penyebab lambannya banjir surut karena rumah pompa yang bekerja kurang maksimal.

"Banjir lama surut karena ada mesin pompa air yang rusak. Ini disebabkan penggunaan yang over sehingga kerja mesin menjadi lemah dan tidak menyedot air secara maksimal," ujar Bupati muda yang akrab disapa Gus Muhdlor ini kepada Memo X, Sabtu (27/01/2024) sore.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dwijono Prawito serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pura Margu dan Sumber Daya Air (PUBM dan SDA), Dwi Eko Saptono serta Camat Tanggulangin, Sabino Mariano.

Gus Muhdlor akhirnya memerintahkan kepada Kepala Dinas



CEK - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali didampingi Kepala BPBD Dwijono Prawito, Kepala Dinas PUBM dan SDA Dwi Eko Saptono dan Camat Tanggulangin Sabino Mariano mengecek penyebab banjir lamban surut di SMPN 2 Tanggulangin, Sabtu (27/01/2024) sore.

PUBM dan SDA, Dwi Eko Saptono untuk segera mengecek satu persatu rumah pompa di tiga desa. Yakni di Desa Kedungbanteng, Banjarasri dan Desa Banjarpanji Kecamatan Tanggulangin yang menjadi langganan banjir setiap tahun.

"Apalagi di tiga desa itu masih ada 5 rumah pompa yang disebar untuk mengurangi banjir di tiga

desa itu," ungkap Bupati alumni Fisip Unair Surabaya ini.

Selain itu, Gus Muhdlor menjelaskan pihaknya dalam waktu berkala akan rutin mengecek progres kelima rumah pompa itu. Selain itu, akan memaksimalkan fungsi saluran air dan menempatkan pompa air mobile di sejumlah titik banjir untuk membantu menyedot genangan air.

"Semua rumah pompa kita pastikan bekerja maksimal. Kemudian saluran-saluran air dipastikan tidak terhambat sampah dan kita akan menempatkan beberapa pompa air mobile untuk membantu mempercepat penyedotan genangan air," tegas Gus Muhdlor yang juga alumni SMAN 4 Sidoarjo ini.

Kepala Dinas PUBM dan SDA, Dwi Eko Saptono mengaku pi-

haknya akan menyiapkan pompa air mobile untuk ditempatkan di SMPN 2 Tanggulangin. Upaya itu sebagai antisipasi ketika curah hujan tinggi.

"Kami sudah menyiapkan pompa air mobile untuk membantu permasalahan genangan air di SMPN 2 Tanggulangin. Pompa air mobile itu, nantinya akan mempercepat penyedotan

genangan air dan akan dibuang ke sungai," katanya.

Sebelumnya, Dinas PUBM dan SDA sudah merencanakan untuk membangun rumah pompa permanen di sekolah SMPN 2 Tanggulangin. Akan tetapi, terkendala dengan terbatasnya lahan, sehingga tidak memungkinkan dilakukan pembangunan. "Akhirnya kita maksimalkan pompa air mobile untuk menyedot genangan air," jelasnya.

Sementara Camat Tanggulangin, Sabino Mariano menegaskan pihaknya tidak bosan-bosan menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungannya. Setiap desa didorong untuk melakukan kerja bakti bersih desa dan tidak membuang sampah di sungai. Karena dampak dari sampah itu akan merugikan masyarakat sendiri.

"Alhamdulillah Pak Bupati tanggap membantu menanggulangi banjir di wilayah Tanggulangin. Saya menghimbau kepada masyarakat untuk semangat menjaga lingkungan. Jangan sampai langkah baik dari Bupati ini menjadi sia-sia karena kita tidak tergerak untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan akan kembali ke masyarakat sendiri," tandasnya. (par/wan)

Bupati Sidoarjo Hormati Proses Hukum di KPK Sekaligus Pastikan Pelayanan Pajak di BPPD Berjalan Normal

Sidoarjo, Memo X

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali menyampaikan sepenuhnya menghormati proses hukum yang dilakukan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini disampaikan merespon Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim penyidik KPK terhadap sejumlah pegawai di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo kemarin.

Bupati muda yang akrab disapa Gus Muhdlor ini percaya jika KPK bekerja secara profesional dan transparan. Bupati alumni Fisip Unair Surabaya ini juga memastikan layanan masyarakat di instansi Pemkab Sidoarjo, khususnya di Kantor BPPD Pemkab Sidoarjo tetap berjalan normal.

"Kami pastikan pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu dengan adanya



SIDAK - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali saat melakukan sidak di SMPN 2 Tanggulangin Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Sabtu (27/01/2024).

kasus hukum yang saat ini sedang ditangani KPK. Termasuk, layanan pajak di Kantor BPPD Pemkab Sidoarjo," ujar Gus Muhdlor saat melakukan sidak di SMPN 2 Tanggulangin Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Sabtu (27/01/2024).

Selain itu, Gus Muhdlor menjelaskan Pemkab Sidoarjo sepenuhnya menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan ini. "Kami percaya kepada KPK. Kami juga menghormati dan menghargai semua sudah menjadi tugas dan kewen-

gannya masing-masing," ungkap Bupati alumni SMAN 4 Sidoarjo ini.

Gus Muhdlor memastikan pihaknya sepenuhnya mendukung penuh tim penyidik KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Karena itu, Pemkab Sidoarjo mendukung kelancaran proses penyelidikan dugaan perkara yang terjadi di BPPD Pemkab Sidoarjo.

"Terkait siapa saja yang diperiksa itu wewenangnya KPK. Kami belum mengetahui secara pasti prosesnya," tandas Gus Muhdlor.

Diketahui sebelumnya, tim penyidik KPK menangkap sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sidoarjo dalam OTT di Sidoarjo kemarin. Termasuk diantaranya adalah ASN BPPD dan Administrasi Pembangunan Pemkab Sidoarjo serta staf Bank BUMD di Jatim. (par/wan)